

# GLOBAL CORRUPTION BAROMETER 2020 – INDONESIA

## **Transparency International Indonesia (TII)**

merupakan salah satu chapter dari Transparency International, sebuah jaringan global NGO antikorupsi yang berbasis di Berlin, Jerman.

Sejak tahun 2002, TII bersama lebih dari 100 chapter di seluruh dunia, berkomitmen untuk mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, kelompok bisnis, dan masyarakat sipil.

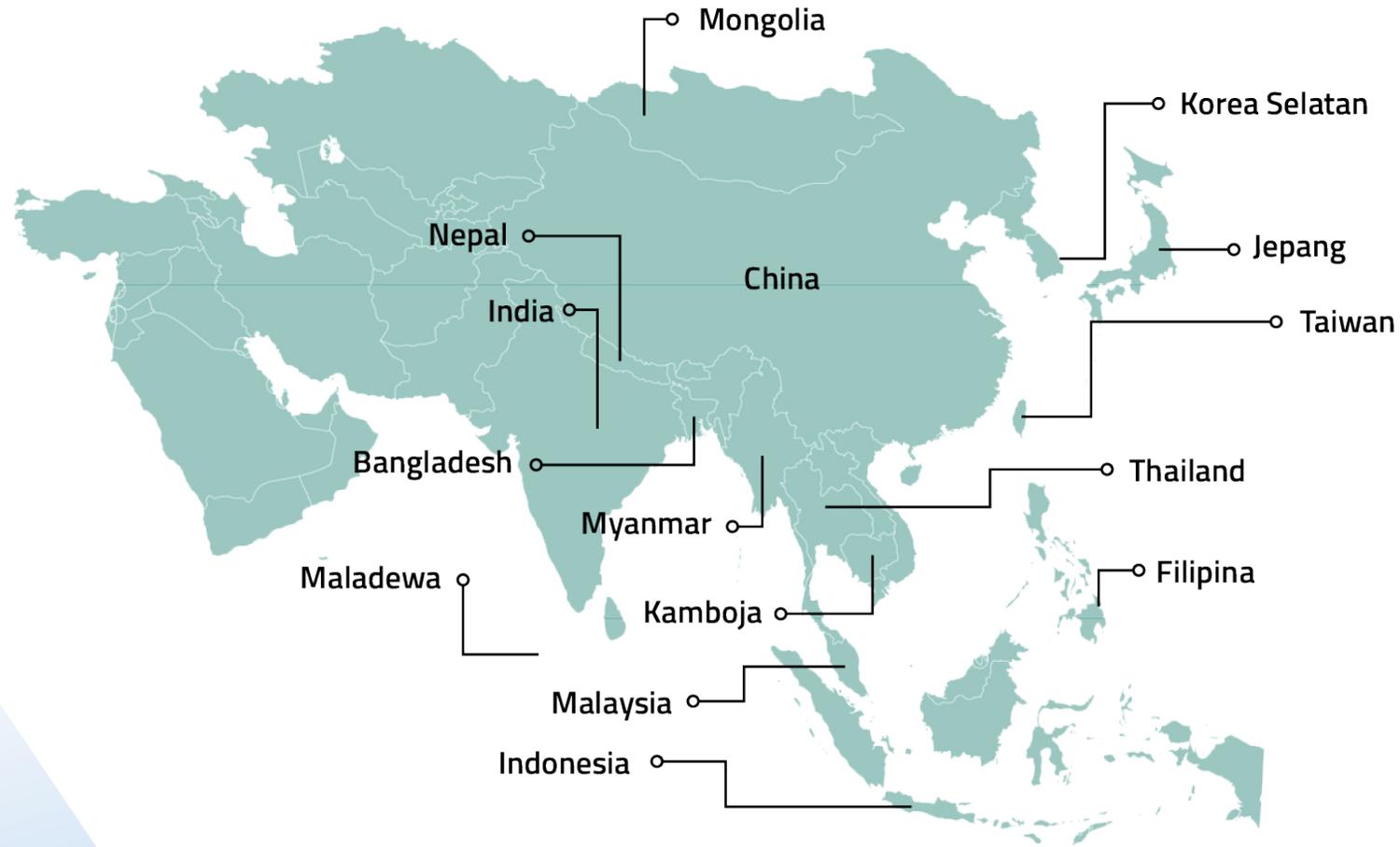
## Tentang GCB Asia 2020

Potret opini publik terbesar dan paling rinci tentang pandangan masyarakat tentang korupsi dan pengalaman langsung praktik penyuapan di Asia dalam kurun waktu 12 bulan terakhir

- Maret 2019 hingga September 2020
  - Melibatkan hampir 20.000 warga
  - Survei dilakukan di 17 negara Asia
  - Basis responden rumah tangga yang representatif secara nasional



## 17 Negara di Asia dalam GCB 2020



## GCB di Indonesia

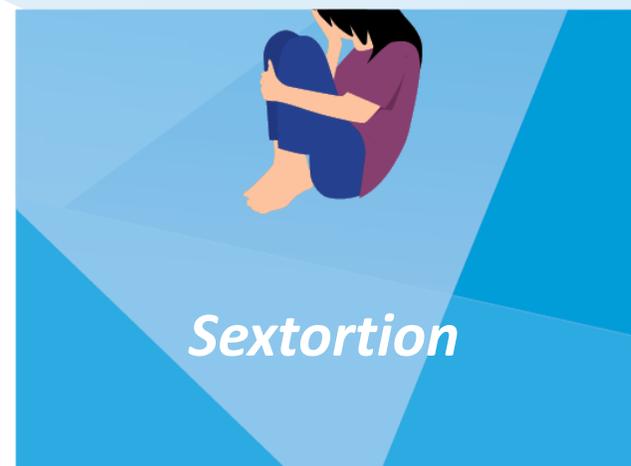
- Wawancara dilakukan berdasarkan telepon dengan menggunakan metode Random Digital Dialing (RDD) dengan kontrol kuota dalam pemilihan sampel dengan *margin of error* +/- 3.1%
- Periode pengambilan data berlangsung pada 15 Juni hingga 24 Juli 2020
- Survei di Indonesia melibatkan 1000 responden rumah tangga (*household*) dengan usia di atas 18 tahun dengan latar belakang pendidikan, gender, dan lokasi yang beragam
- Komposisi responden di Indonesia terdiri dari 50,3% perempuan dan 49,7% laki-laki serta persentase kelompok usia terbanyak 38,2% dalam rentang usia 26-35 tahun.
- Responden survei tersebar di 28 provinsi yang mewakili lima pulau di Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, serta Sulawesi dan Maluku.
- Sebanyak 772 responden berasal dari pedesaan (77,2%) dan 228 diantaranya berasal dari perkotaan (22,8).



# Indikator Global Corruption Barometer



## Yang Baru di GCB 2020



# 10 TEMUAN UTAMA GCB INDONESIA 2020

#1

## Kinerja Pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi dianggap stagnan



**64%**

GCB 2017

**65%**

GCB 2020



Padahal hampir setengah responden menilai tingkat korupsi meningkat selama satu tahun terakhir

**49%**

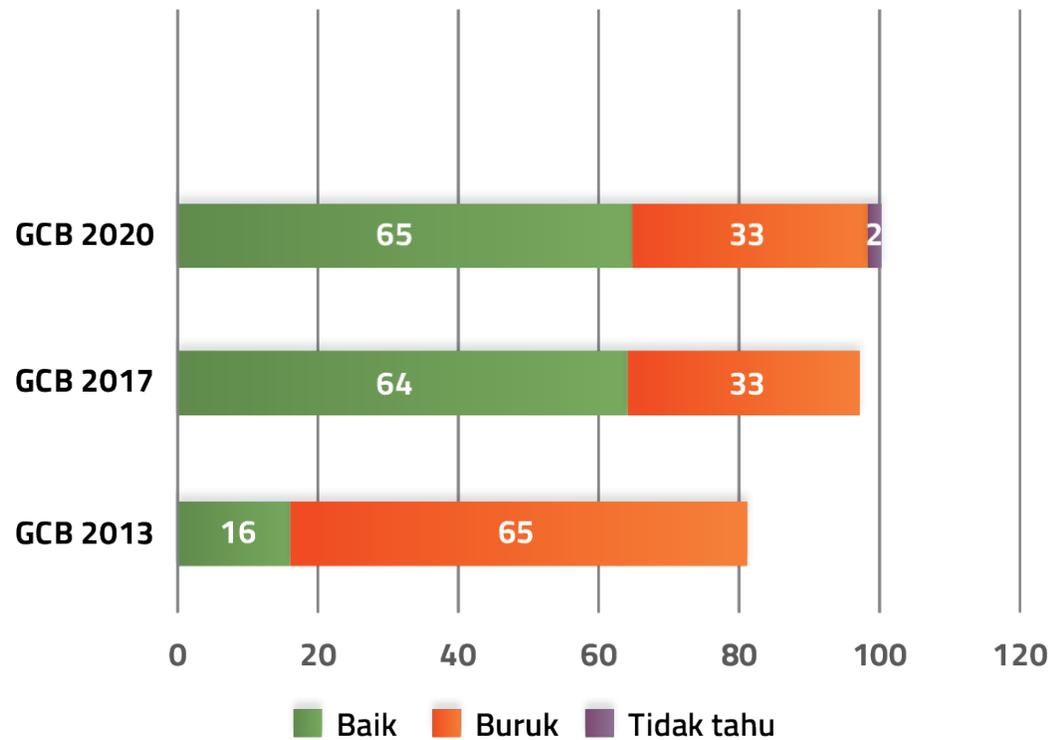


Lebih dari **90%** responden merasa korupsi di tubuh Pemerintah merupakan masalah besar, jauh di atas rerata Asia (74%)



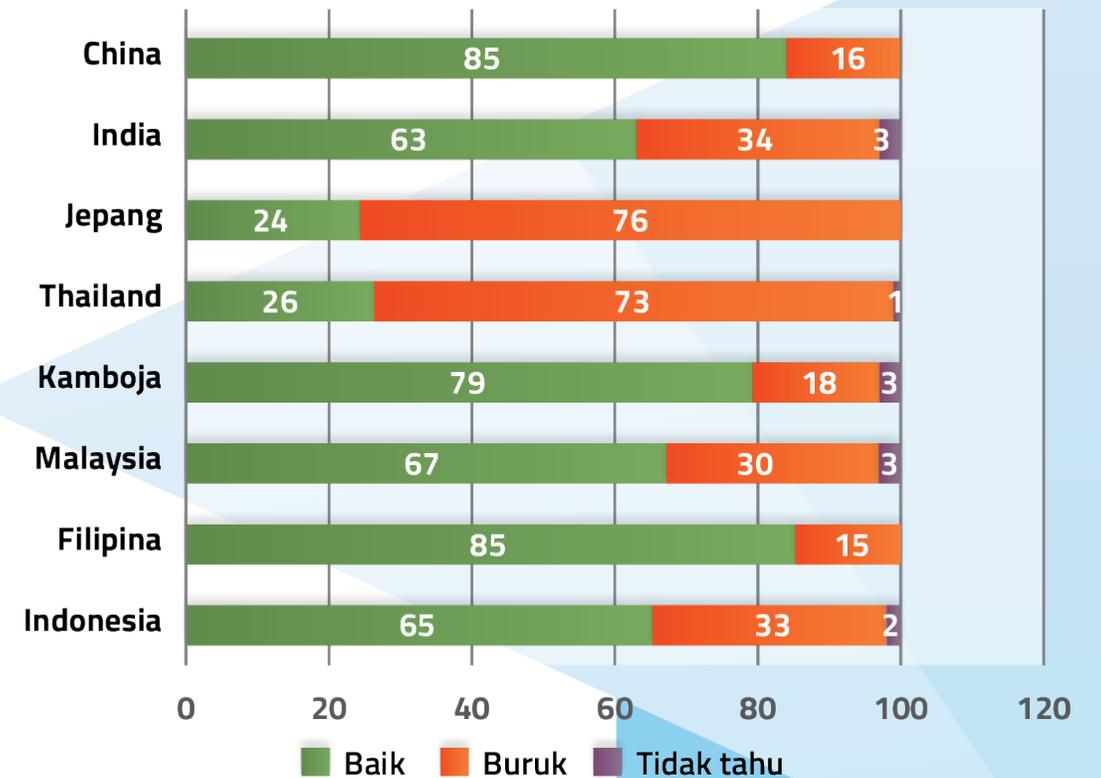
## Kinerja Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi

\*dalam persentase



## Perbandingan Kinerja Pemerintah di Asia dalam Pemberantasan Korupsi

\*dalam persentase



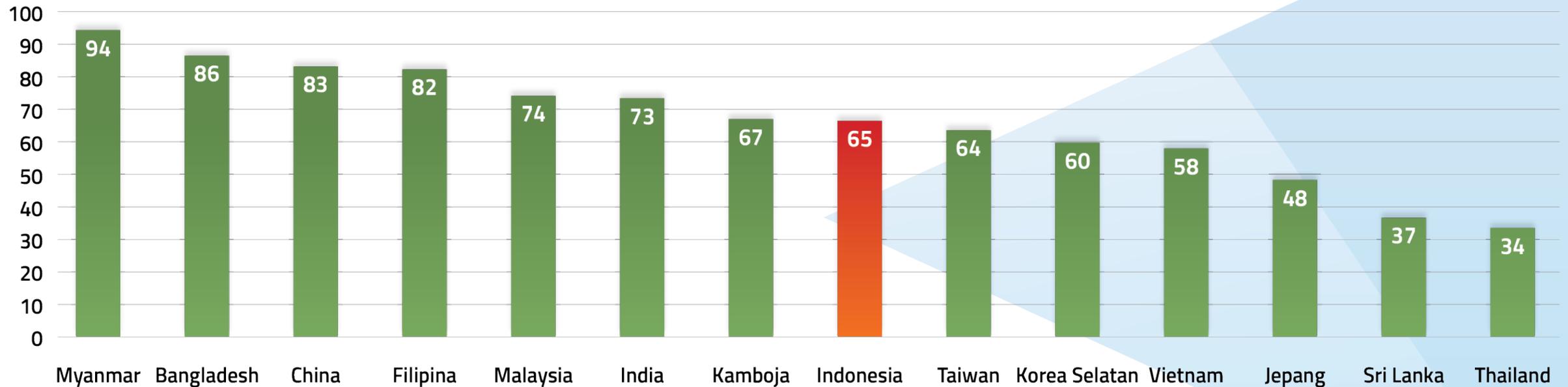
#2

## Hanya 51% publik yang disurvei menilai kinerja KPK cukup baik dalam satu tahun terakhir

- Sejalan dengan tren menurunnya tingkat kepercayaan publik
- Meski begitu, KPK memiliki modal sosial besar karena lebih dari **90%** responden tahu mengenai KPK
- Kehadiran *Anti-Corruption Agencies* (ACA) di Asia dianggap krusial dalam menopang agenda pemberantasan korupsi, dimana tingkat penerimaan di Asia mencapai persentase **63%**



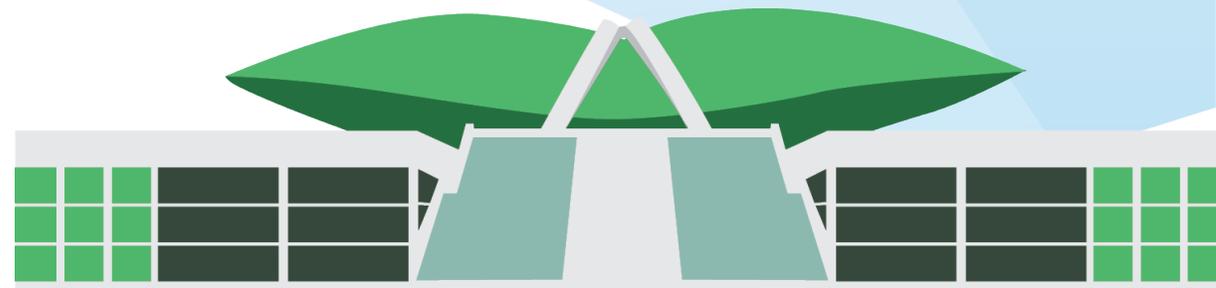
## PERBANDINGAN PERSEPSI PUBLIK TERHADAP KINERJA LEMBAGA ANTI KORUPSI DI NEGARA-NEGARA ASIA



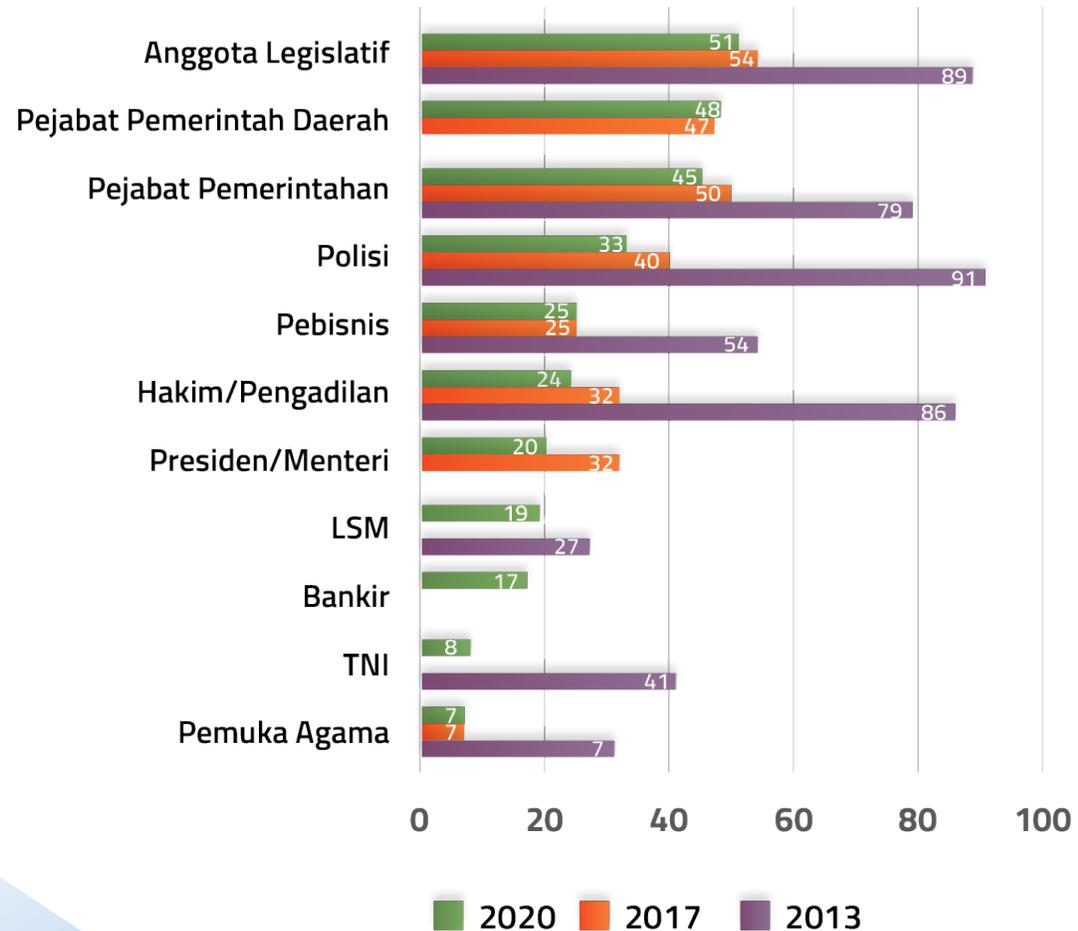
#3

## DPR dipersepsikan sebagai lembaga terkorup di Indonesia

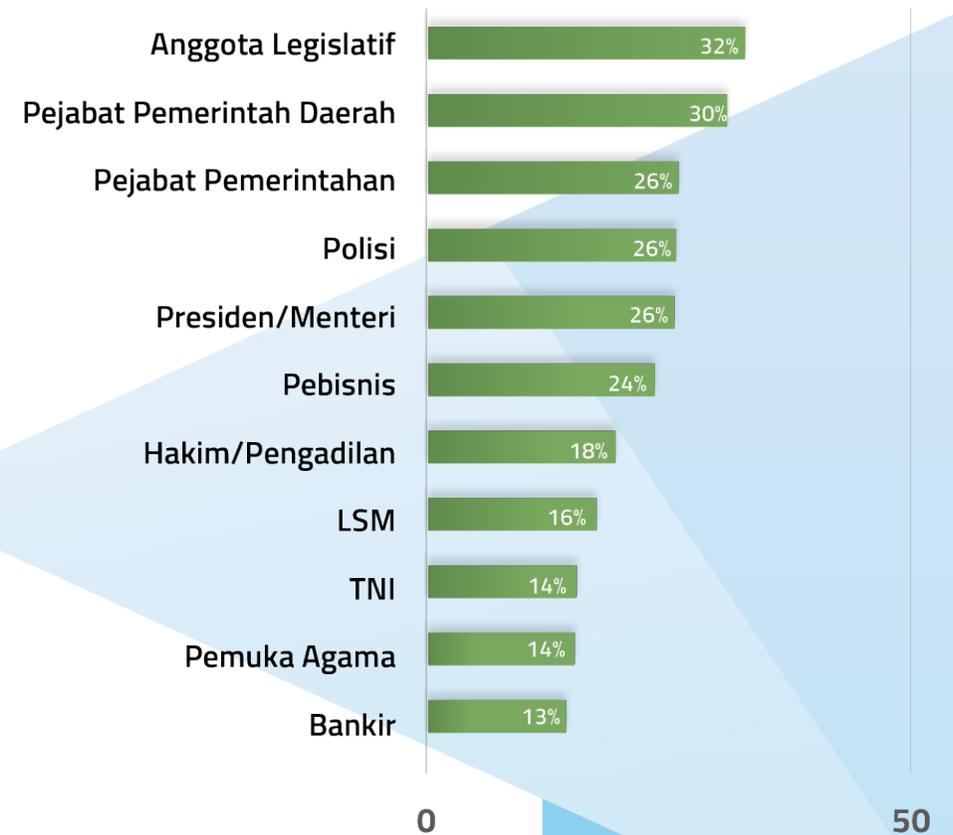
- Sejalan dengan tren di Asia, Parlemen merupakan institusi publik yang paling korup
  - Dibandingkan pengukuran GCB 2017, seluruhnya cukup turun signifikan, kecuali persepsi pada Pemerintah Daerah yang naik 1%
  - Di Kepolisian dan Pengadilan, ada gejala reformasi walaupun tidak signifikan



## Lembaga/Institusi Terkorup di Indonesia



## Lembaga/Institusi Terkorup di Asia



#4

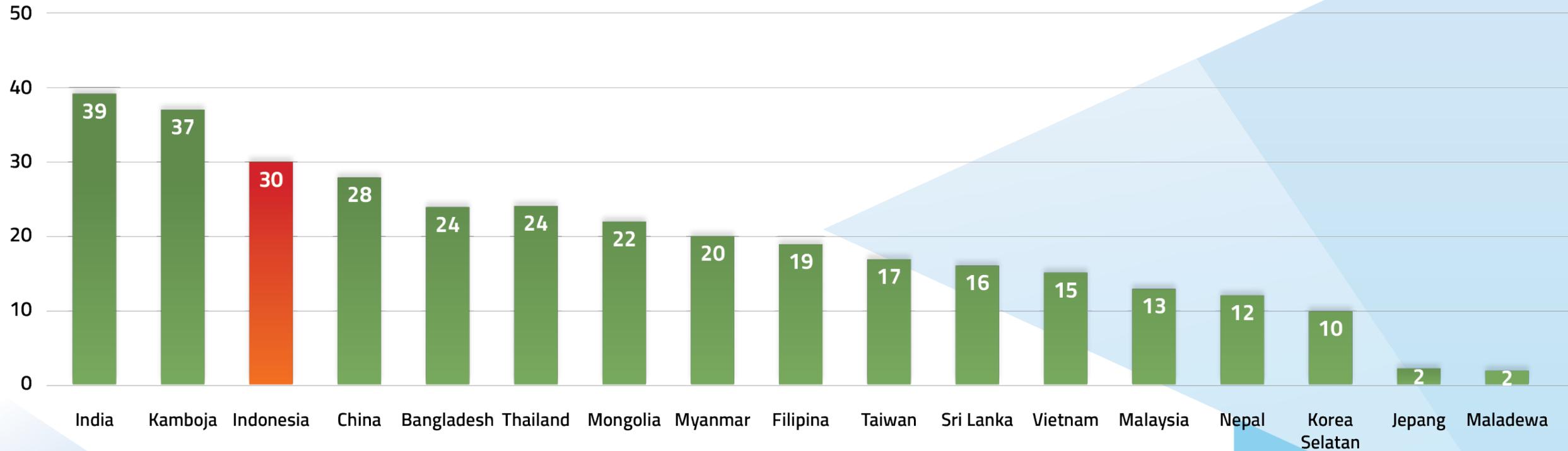
## Sebanyak 3 dari 10 responden mengaku pernah membayar suap ketika mengakses layanan publik

- Tingkat suap di Indonesia tertinggi ke-3 diantara 17 negara Asia yang disurvei; tidak turun signifikan dari hasil GCB 2017
  - Alasan membayar suap karena sebagai tanda terima kasih **(33%)**, memang diminta membayar biaya yang tidak resmi **(25%)**, dan ditawarkan agar membayar suap demi proses yang lebih cepat **(21%)**
- Lebih dari **90%** mengakui tidak pernah melaporkan praktik suap yang dialaminya
  - Selama pandemi Covid-19, sebesar **97%** responden tidak pernah memberikan suap



## Tingkat Suap Layanan Publik di Asia

\*dalam persentase



#5

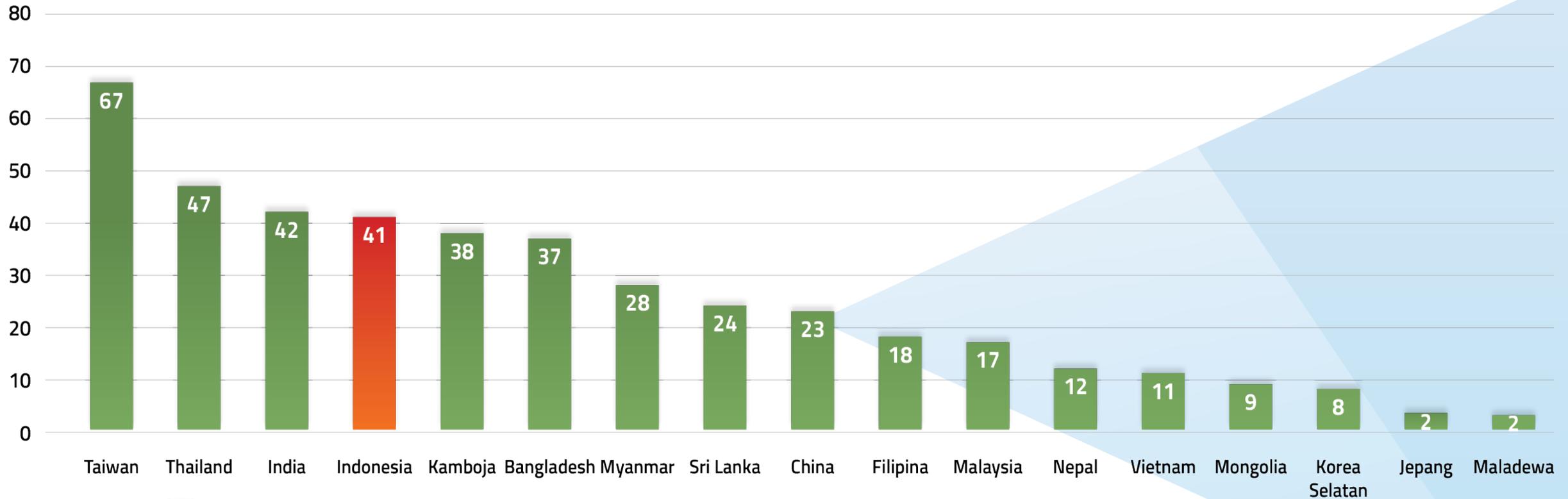
## Pengalaman suap masyarakat paling tinggi terjadi di layanan Kepolisian (41%), jauh di atas rata-rata Asia (23%)



- Pengalaman suap untuk layanan di Kepolisian, Dukcapil, dan Sekolah kembali naik dibandingkan GCB 2017
  - Rumah Sakit/Puskesmas merupakan layanan dengan pengalaman suap terendah (**19%**), namun tidak ada penurunan signifikan dari pengukuran sebelumnya
  - Mayoritas warga berusia muda mengaku pernah melakukan suap dalam satu tahun terakhir, yakni 18-24 (**45%**) dan 25-34 (**30%**) jauh di atas rata-rata Asia (masing-masing 22% dan 19%)

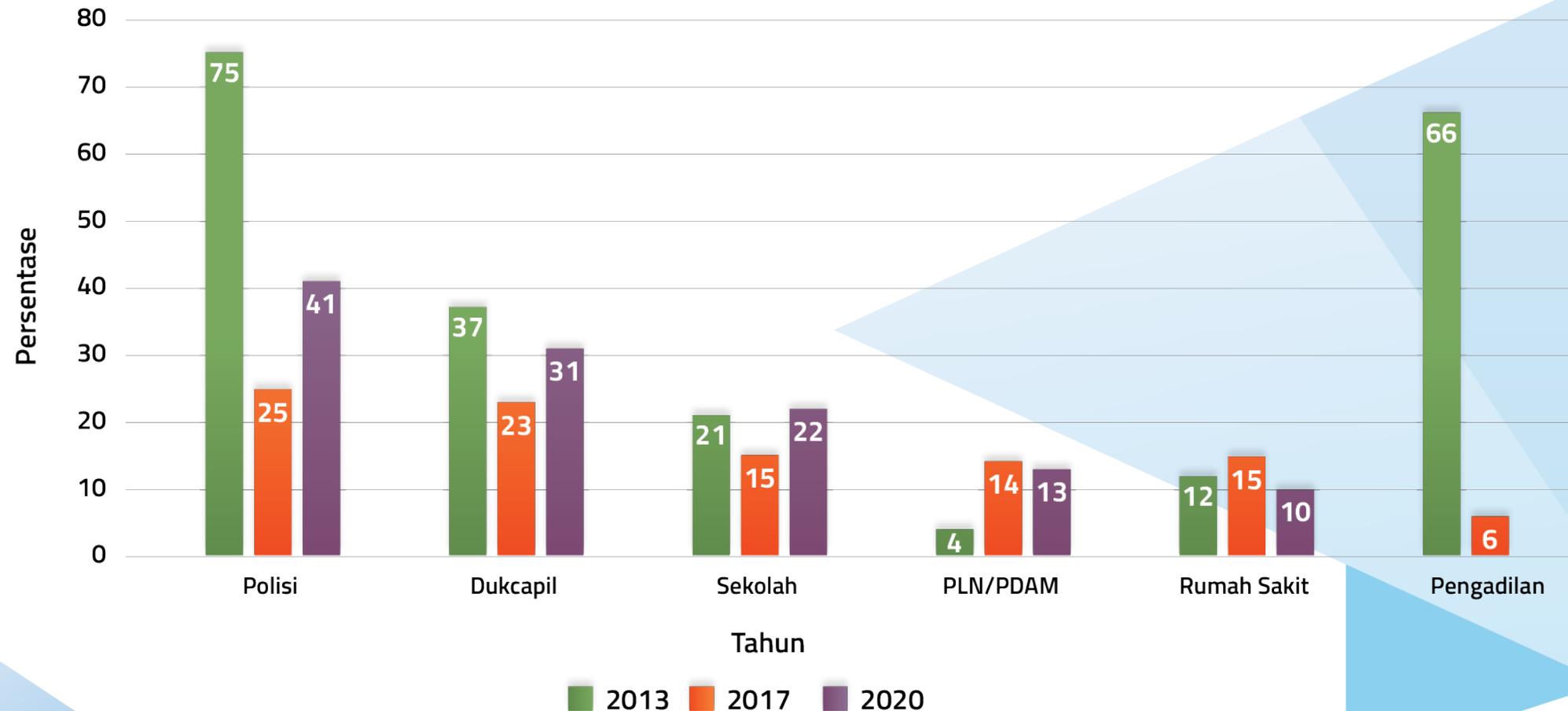


## Suap di Layanan Kepolisian di 17 Negara Asia





## Pengalaman suap untuk layanan di Kepolisian, Dukcapil, dan Sekolah kembali naik dibandingkan GCB 2017



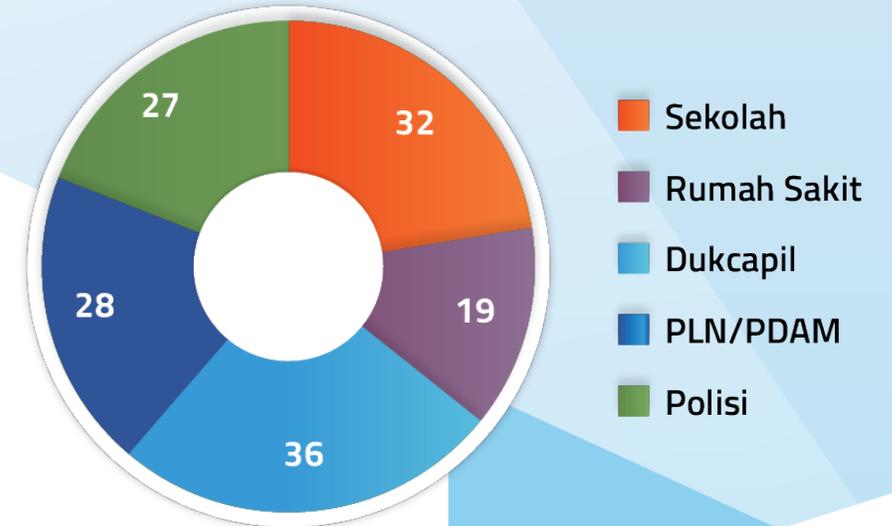
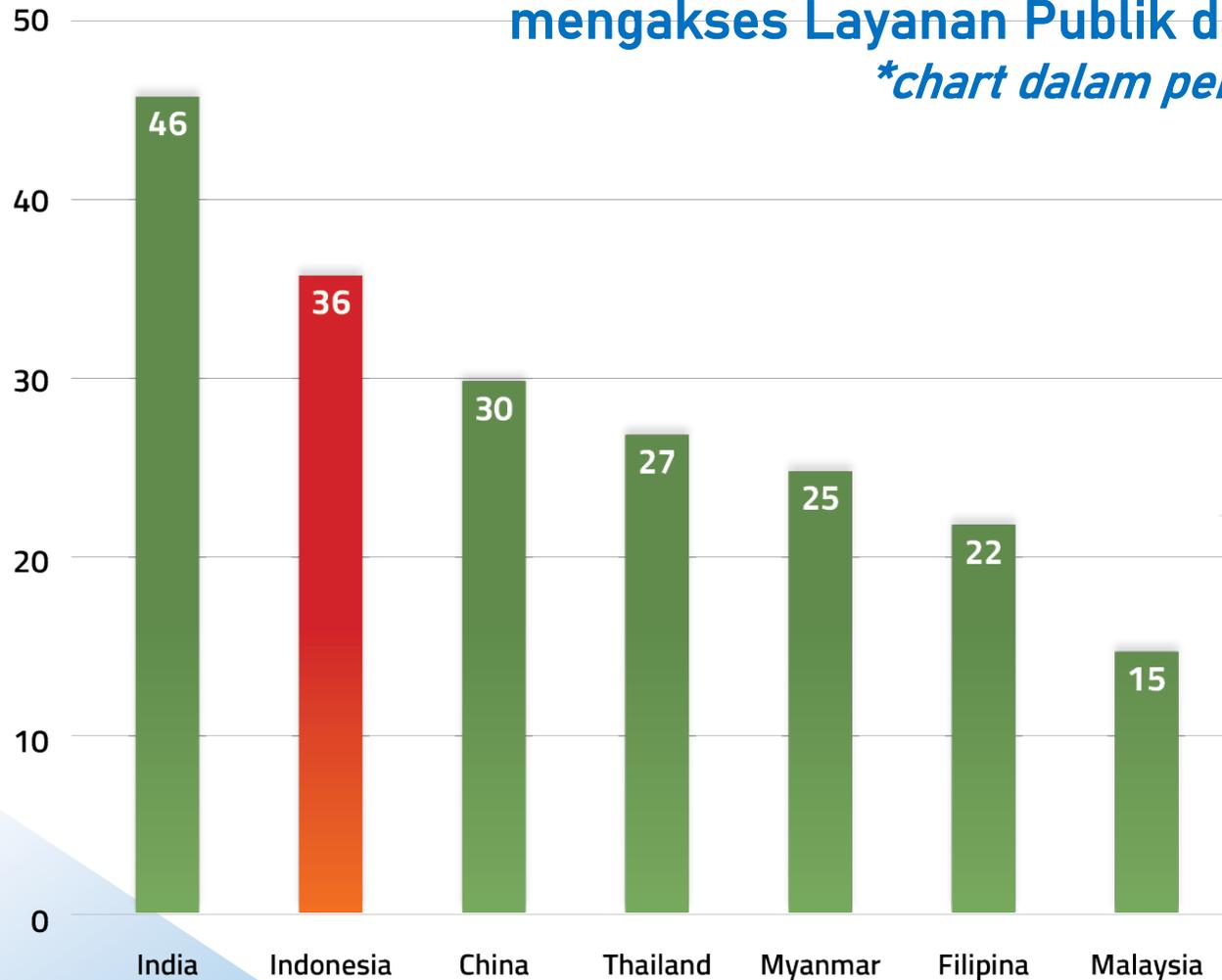
#6

## Lebih dari 80% responden yang disurvei menganggap koneksi pribadi penting jika ingin mendapatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik

- Penggunaan koneksi pribadi untuk mengakses layanan publik di Indonesia merupakan proporsi tertinggi kedua setelah India
- **1** dari **2** responden pernah menggunakan koneksi pribadi dalam mengakses layanan publik selama satu tahun terakhir
  - Layanan publik untuk dokumen identitas paling banyak menggunakan koneksi pribadi (**36%**)

## 36% responden menggunakan Koneksi Personal untuk mengakses Layanan Publik dalam 12 bulan terakhir

*\*chart dalam persentase*



#7

1 dari 3 responden mengaku pernah ditawari untuk menjualbelikan suaranya ketika Pemilu, baik pemilihan Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah selama lima tahun terakhir

- Mayoritas responden yang pernah mengalami, mengaku pernah ditawari hingga satu sampai dua kali
- Tingkat *vote-buying* di Indonesia **(26%)** hampir dua kali lipat rerata Asia **(14%)**



## Persepsi Publik terhadap Praktik Pembelian Suara di Asia



#8

## Lebih dari setengah korban pemerasan seksual yang mengakses layanan publik adalah perempuan

● *Sextortion* adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan seksual dan sering kali terjadi sebagai imbalan atas layanan publik, seperti layanan kesehatan atau pendidikan.

● Bersifat korban langsung atau pernah mendengar

● Indonesia merupakan negara dengan tingkat sekstorsi tertinggi di Asia (18%), diikuti dengan Sri Lanka (17%) dan Thailand (15%), dua kali lipat di atas rerata Asia (8%)

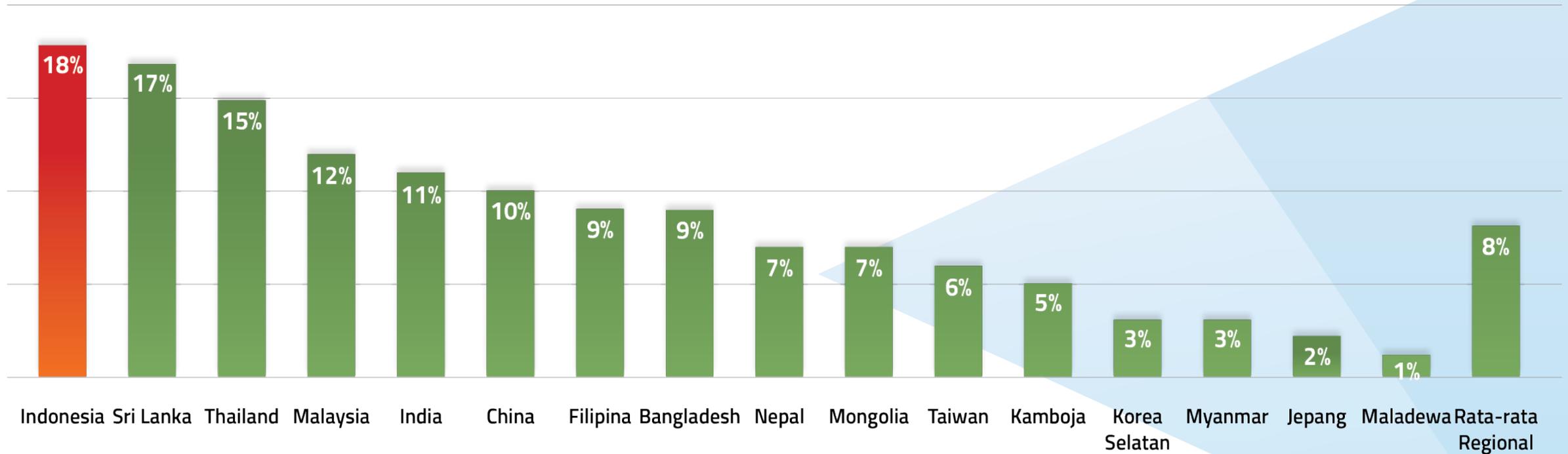
● Mayoritas responden yang pernah mengalami atau mendengar, mengaku pernah ditawari dalam frekuensi satu sampai dua kali

### Contoh:

1. Kasus dua petugas polisi di Malang, Jawa Timur, pada 2016.
2. Mantan hakim, Setyabudi Cahyo, memeras secara seksual dan divonis korupsi pada 2009 dan 2010.
3. Baru-baru ini, selama pandemi COVID-19, seorang penumpang maskapai perempuan diperas secara seksual oleh dokter di bandara sebagai imbalan untuk mendapatkan akses hasil tes COVID-19 yang cepat.



## Tingkat Sextortion di Indonesia Tertinggi di Asia



#9

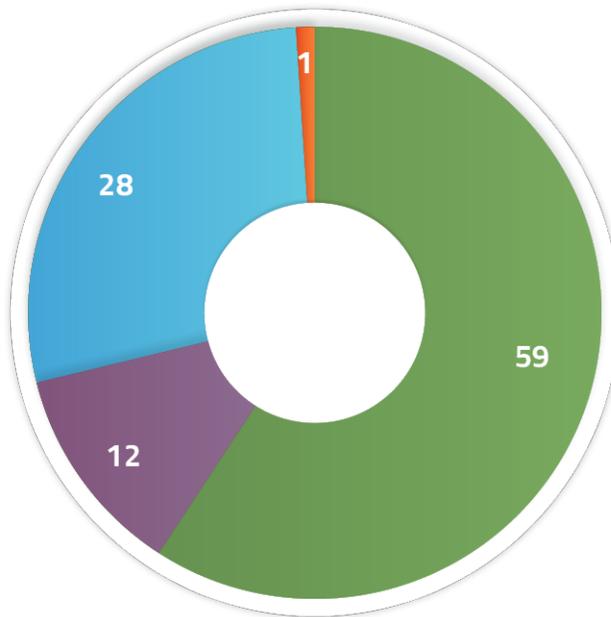
## Sebanyak hampir 60% responden meyakini bahwa warga biasa dapat membuat perubahan

- Optimisme ini turun dari GCB 2017 yang sebesar **78%**
- Lebih dari **60%** warga biasa mengaku takut akan ada pembalasan jika melaporkan kasus korupsi, hampir naik dua kali lipat dari hasil GCB 2017
  - Sebesar **66%** responden tidak yakin laporan korupsi akan ditindaklanjuti



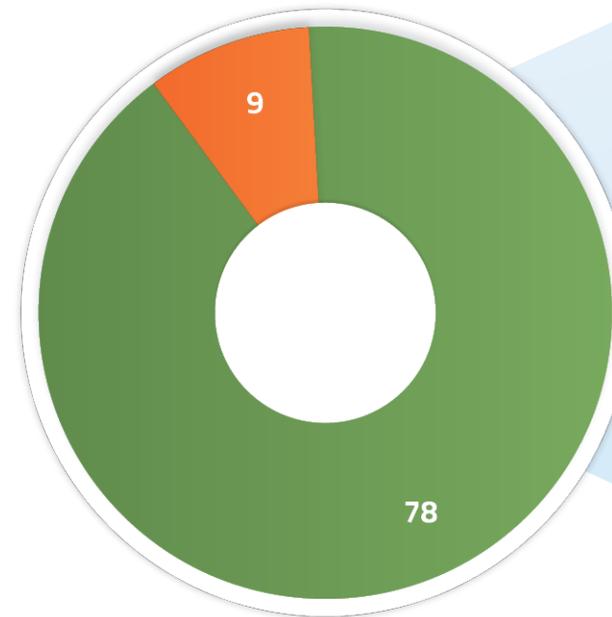
## Publik Melawan Korupsi

**GCB 2020**  
\*dalam persentase



- Setuju
- Tidak Setuju
- Tidak keduanya
- Tidak tahu

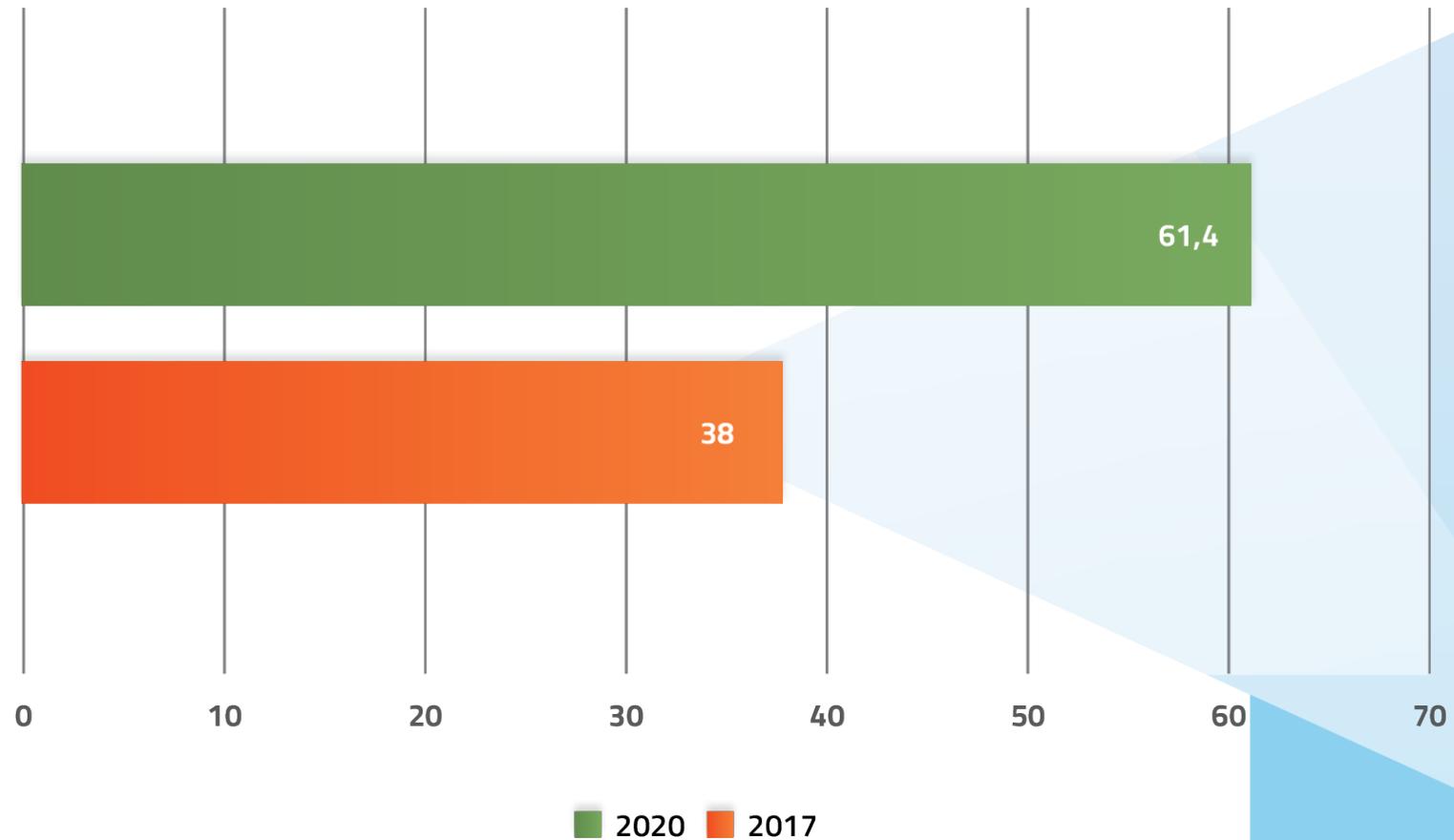
**GCB 2017**  
\*dalam persentase



- Setuju
- Tidak Setuju



## Mayoritas responden takut akan ada pembalasan jika melaporkan kasus korupsi



#10

## Kurang dari setengah responden sadar bahwa dirinya memiliki hak atas akses informasi publik

● **8** dari **10** responden tidak pernah melakukan permintaan informasi

● Kurang dari **50%** warga yakin Pemerintah mempertimbangkan masukan dari publik

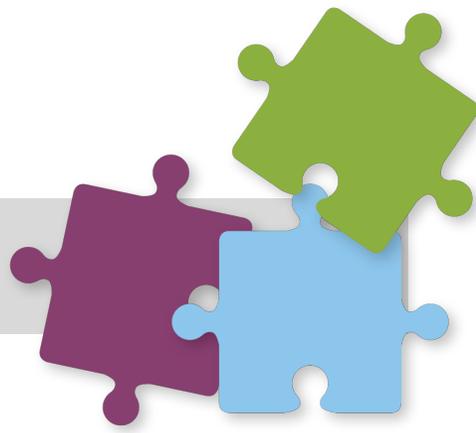


# 10 TEMUAN UTAMA GCB INDONESIA 2020

1. Kinerja Pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi dianggap stagnan
2. Hanya 51% publik yang disurvei menilai kinerja KPK cukup baik dalam satu tahun terakhir
3. DPR dipersepsikan sebagai lembaga terkorup di Indonesia
4. Sebanyak 3 dari 10 responden mengaku pernah membayar suap ketika mengakses layanan publik
5. Pengalaman suap masyarakat paling tinggi terjadi di layanan Kepolisian (41%), jauh di atas rata-rata Asia (23%)
6. Lebih dari 80% responden yang disurvei menganggap koneksi pribadi penting jika ingin mendapatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik
7. 1 dari 3 responden mengaku pernah ditawari untuk menjualbelikan suaranya ketika Pemilu, baik pemilihan Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah selama lima tahun terakhir
8. Lebih dari setengah korban pemerasan seksual yang mengakses layanan publik adalah perempuan
9. Sebanyak hampir 60% responden meyakini bahwa warga biasa dapat membuat perubahan
10. Kurang dari setengah responden sadar bahwa dirinya memiliki hak atas akses



## Kesimpulan



1. Korupsi masih dianggap masalah besar oleh publik, namun upaya Pemerintah dianggap moderat
2. Tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja Pemerintah, berbanding lurus dengan tingkat kinerja KPK
3. Lembaga legislatif, birokrasi dan penegakan hukum dianggap masih jadi sarang korupsi. Praktik suap di lembaga penegak hukum dan lembaga politik cenderung meningkat.
4. Penting mengakui *human cost of corruption*, salah satunya melalui penguatan kajian tentang sektorsi
5. Peran publik dianggap masih krusial, walaupun optimismenya menurun
6. Perlindungan pelapor korupsi masih menjadi persoalan



## Rekomendasi

1. Perkuat kelompok masyarakat sipil, terutama di daerah
2. Berdayakan warga untuk mengakses informasi publik
3. Pembenahan integritas di sektor politik, terutama dalam Partai Politik dan Pemilu
4. Membangun pencegahan praktik suap, konflik kepentingan dan favoritisme dalam pelaksanaan pelayanan publik
5. Dorong Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja secara transparan dan akuntabel
6. Bangun pendekatan gerakan antikorupsi berbasis korban, seperti membangun mekanisme perlindungan pelapor yang lebih terintegrasi
7. Mengakui pemerasan seksual untuk mengakses layanan publik (*sextortion*) sebagai bagian dari tindak pidana korupsi di Indonesia
8. Pemerintah perlu mendengarkan dan membuka ruang partisipasi publik secara serius



**TRANSPARENCY  
INTERNATIONAL**  
 **Indonesia**  
the global coalition against corruption



[www.ti.or.id](http://www.ti.or.id)



Transparency International Indonesia



@tiindonesia



TlIndonesia17



tiindonesia